

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang mengambil topik yang umum digunakan yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian sekarang diantaranya yaitu :

2.1.1. Penelitian Anisa Mustika Sari, Hiro Tugiman dan Annisa Nurbaiti (2016)

Penelitian ini mengangkat topik yang berjudul “pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi data panel. Metode yang di gunakan adalah *purposive sampling* untuk memperoleh sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Dewan komisaris & Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Variabel yang digunakan adalah dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.
2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Data yang digunakan sama-sama berasal dari data sekunder dimana data diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2015. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.

2.1.2. Irma, Yeni, Noorina dan H Ali Muktiyanto (2015)

Penelitian ini mengangkat topik yang berisi tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang baik terhadap kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. *Sampling* yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2012. Teknik analisa data yang digunakan yaitu *Structural Equation Model*

(SEM). Metode yang di gunakan adalah *purposive sampling* Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Dewan komisaris & Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan,

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Variabel independen yang digunakan adalah dewan komisaris, komite audit
2. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan.
3. Data yang digunakan sama-sama berasal dari data sekunder dimana data diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2012. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.

2.1.3. Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan. (2015)

Penelitian ini mengangkat topik yang berisi tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*

terhadap kinerja perusahaan. Sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu Perusahaan bidang keuangan pada tahun 2011-2013 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisis regresi berganda. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk memperoleh sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Dewan komisaris & Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

1. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan
2. Variabel independen yang digunakan adalah dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan manajerial.
3. Data yang digunakan sama-sama berasal dari data sekunder dimana data diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.
2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Sedangkan sampel yang

digunakan oleh peneliti saat ini adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.



TABEL 2.1

PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN SEKARANG

No.	Keterangan	Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan.	Irma, Yeni, Noorina, dan H Ali Muktiyanto	Anisa Mustika Sari, Hiro Tugiman, dan Annisa Nurbaiti	Dicky Himawan
1.	Tahun	2015	2015	2016	2020
2.	Sampel	Perusahaan bidang keuangan pada tahun 2011-2013 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2012.	Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015	Perusahaan manufaktur Sektor <i>Consumer Goods</i> yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019
3.	Variabel Dependen	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan
4.	Variabel Independen	Good Corporate Governance (dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial)	Good Corporate Governance (dewan komisaris, komite audit, kualitas audit)	Good Corporate Governance (dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan)	Good Corporate Governance (dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial)
5.	Teknik Pengambilan Sampel	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
6.	Metode Pengumpulan Data	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2013. yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan dan <i>annual report</i> perusahaan manufaktur sektor <i>consumer goods</i> dari tahun 2015-2019 yang diperoleh melalui situs BEI

7.	Teknik Analisis	Analisis regresi linier berganda	<i>Structural Equation Model</i> (SEM)	Analisis regresi data panel	Analisis regresi linier berganda
8.	Hasil Penelitian	Dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, serta ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.	Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan Kualitas audit berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.	Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.	-

Sumber : Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan. (2015), Irma, Yeni, Noorina, dan H Ali Muktiyanto (2015), Anisa Mustika Sari, Hiro Tugiman, dan Annisa Nurbaiti (2016)

2.2 Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang mendasari. Teori tersebut antara lain yang membahas tentang kinerja perusahaan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu *Good Corporate Governance* serta teori yang dikemukakan oleh pendapat para ahli.

2.2.1 Kinerja keuangan perusahaan

Menurut Jumingan (2006, p. 240), kinerja keuangan adalah proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Menurut Munawir (2011, p. 50), pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Peneliti memilih rasio profitabilitas karena peneliti menganggap bahwa rasio profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Rasio ini menguraikan ukuran kinerja perusahaan yang digunakan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan diantaranya yaitu :

1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Syamsuddin (2009, p. 64), menyatakan bahwa ROA merupakan rasio pengukuran yang menggambarkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam setiap rupiah yang ditanamkan dalam bentuk asset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \dots\dots\dots(1)$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Syamsuddin (2009, p. 65), *Return On Equity* merupakan rasio pengukuran yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diterima bagi pemegang saham terhadap investasi yang ditanamkan. Rumus *Return On Equity* (ROE) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \dots\dots\dots(2)$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Alexandri (2008, p. 200) *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang dipakai untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan keuntungan bersih sesudah dipotong oleh pajak. Menurut kasmir (2013, p. 200), rumus *Net Profit Margin* (NPM) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \dots\dots\dots(3)$$

4. *Operating Profit* (OPM)

Menurut Gitman (2008, p. 65), *Operating Profit Margin* (OPM) adalah rasio yang mengukur persentase dari setiap penjualan yang tersisa setelah (dikurangi) semua biaya dan beban selain bunga, pajak, dan dividen saham preferen. Rumus *Operating Profit Margin* (OPM) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{Penjualan}} \dots\dots\dots(4)$$

5. *Gross Profit Margin* (GPM)

Menurut Sawir (2009, p. 18) *Gross Profit Margin* (GPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok ataupun biaya produksi, mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan untuk berproduksi dengan efisien. Rumus *Gross Profit Margin* (GPM) dapat ditentukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}} \dots\dots\dots(5)$$

2.2.2 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Effendi (2016, p. 47), *agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Menurut Effendi (2016, p. 48), Terdapat beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *Agency conflict*

Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara prinsipal dan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadinya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan.

b. *Agency problem*

Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah *agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan supaya dana yang diinvestasikannya mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan *incentive* atas pengelolaan dana pemilik.

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Sesuai Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sesuai Pasal 3, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011. Prinsip-prinsip GCG, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Syafitri (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya yaitu komite audit.

2.2.4 Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas pokok dan fungsi dari komisaris. Diantaranya ialah:

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Adapun, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, dewan komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perseroan.
3. Dewan komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas nya sebagaimana mestinya.

Sesuai Pasal 13 ayat 2, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, dewan komisaris merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 108 ayat (5) disebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib setidaknya memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Dewan komisaris dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D_KMSRS = \Sigma \text{ jumlah anggota dewan komisaris} \dots\dots\dots(6)$$

2.2.5 Komisaris Independen

Salah satu fungsi komisaris independen adalah mengawasi kinerja suatu perusahaan. Komisaris independen juga mengemban tugas sebagai wakil dari *stakeholders* untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai Pasal 13 ayat 3, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, yang dimaksud dengan anggota komisaris independen adalah anggota komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sedangkan menurut Alijoyo (2014, p. 23), komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non independen adalah komisaris yang berasal dari dalam perusahaan itu. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Zarkasyi (2008, p. 96), salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Komisaris independen dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K_INDPN = \frac{\text{Jumlah komisaris independen} \times 100\%}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \dots\dots\dots(7)$$

2.2.6 Komite Audit

Sesuai Pasal 1 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Zarkasyi (2008, p. 17), komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Menurut Effendi (2016, p. 59), keberadaan komite audit diharapkan dapat memberi nilai tambah dengan diterapkannya mekanisme *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya manipulasi pada informasi yang disajikan. Sesuai Pasal 4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K_AUDIT = \Sigma \text{jumlah anggota komite audit} \dots\dots\dots(8)$$

2.2.7 Kepemilikan Manajerial

Menurut Effendi (2016, p. 59), kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut

dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Mutiya (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek yang dapat meminimumkan konflik keagenan. Dalam hal ini manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan tetapi juga bertindak sebagai pemegang saham. Dengan diberikannya kepemilikan saham kepada manajer, maka seorang manajer cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dirinya sendiri. El-Chaarani (2014) menyatakan bahwa pengukuran kepemilikan manajerial persentase total saham dari seluruh direktur eksekutif dibandingkan dengan total saham. Kepemilikan manajerial dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K_MNJRL = \frac{\text{Saham Manajer} \times 100\%}{\text{Saham Beredar}} \dots\dots\dots(9)$$

2.2.8 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Apabila semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka seharusnya semakin meningkat pula pengawasan yang terjadi dalam perusahaan, serta mempermudah perusahaan untuk mengambil keputusan. Selain itu dengan semakin banyaknya dewan komisaris, maka dapat mencegah perilaku *oportunis* manajer puncak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa, Hiro dan Annisa (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dianggap bahwa semakin banyak dewan komisaris yang ada pada suatu perusahaan. Maka, kinerja perusahaan juga akan semakin baik dikarenakan untuk mencegah adanya tindak kecurangan yang ada dalam suatu perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.2.9 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Salah satu fungsi komisaris independen adalah mengawasi kinerja suatu perusahaan. Komisaris independen juga mengemban tugas sebagai wakil dari *stakeholders* untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitiannya, Sheikh, Khan, & Wang (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komisaris independen diharapkan dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melia & Yulius (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengeluaran perusahaan untuk memberi gaji kepada komisaris independen tersebut akan semakin besar pula. Sehingga hal tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2.10 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris mengemban tugasnya, tugas komite audit beberapa diantaranya yaitu melakukan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan perusahaan, pelaksanaan audit dan juga implementasi dari *corporate governance* pada perusahaan. Dengan begitu, semakin banyak komite audit dalam perusahaan, maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Irma et al., (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Romano (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti dengan lebih sedikitnya jumlah komite audit, maka, pengendalian internal akan menjadi lebih baik, meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan dan keputusan dewan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

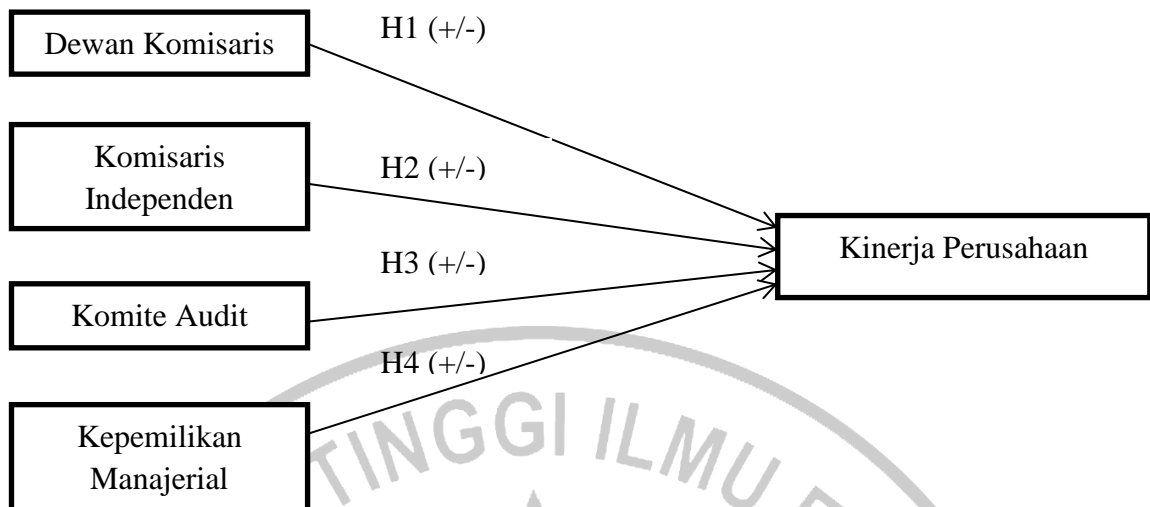
2.2.11 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, yaitu direktur memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan akan berada pada titik optimal. Ini terjadi karena direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung. Sehingga kemungkinan munculnya *agency problem* akan semakin tipis jika dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Jika direktur perusahaan juga berlaku sebagai pemilik perusahaan, maka terjadilah kesamaan tujuan antara *principal* dengan *agent*. Dengan adanya kepemilikan saham dari manajerial, maka akan meningkatkan motivasi manajerial untuk

bekerja lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan juga manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin meningkat pula kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Gil & Obradovich (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Leatemia, Mangantar & Rogi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka dalam memahami variabel-variabel tersebut, diperlukan suatu kerangka pemikiran. Adanya landasan teori yang telah diungkapkan, dan disusun hipotesis penelitian, kemudian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian untuk dijadikan acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu.

H1: Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H3: Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.